

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahannya, Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan daerah yang lebih luas dan bebas, diharapkan daerah mampu untuk mengatur, memanfaatkan, serta menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Hal tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia menerapkan otonomi daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan resmi menerapkan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001. Namun Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah untuk dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

Serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Munculnya undang-undang tersebut sebagai pendukung dari pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah dapat secara bebas mengatur pembangunan daerahnya sendiri, namun di satu sisi Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu ciri bahwa suatu daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemandirian Keuangan Daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah, karena tentunya Pemerintah Pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh Pemerintah Daerah tersebut (Neneng dan Nisa, 2018). Tinggi rendahnya Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dikatakan tinggi, jika Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat, sebaliknya Tingkat Kemandirian Keuangan dikatakan rendah, jika Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat.

Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan pinjaman. Untuk mencapai Tingkat Kemandirian Daerah yang baik, maka Pemerintah Daerah harus mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat dapat menurun. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan menurunnya penerimaan bantuan dari Pemerintah Pusat akan mencerminkan Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah dalam kondisi baik. Menurut Halim

(2004), untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat serta agar daerah mandiri, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus berupaya untuk dapat menggali potensi serta meningkatkan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan bantuan keuangan dari provinsi.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu salah satunya dengan menggali potensial yang dimiliki daerah itu sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak

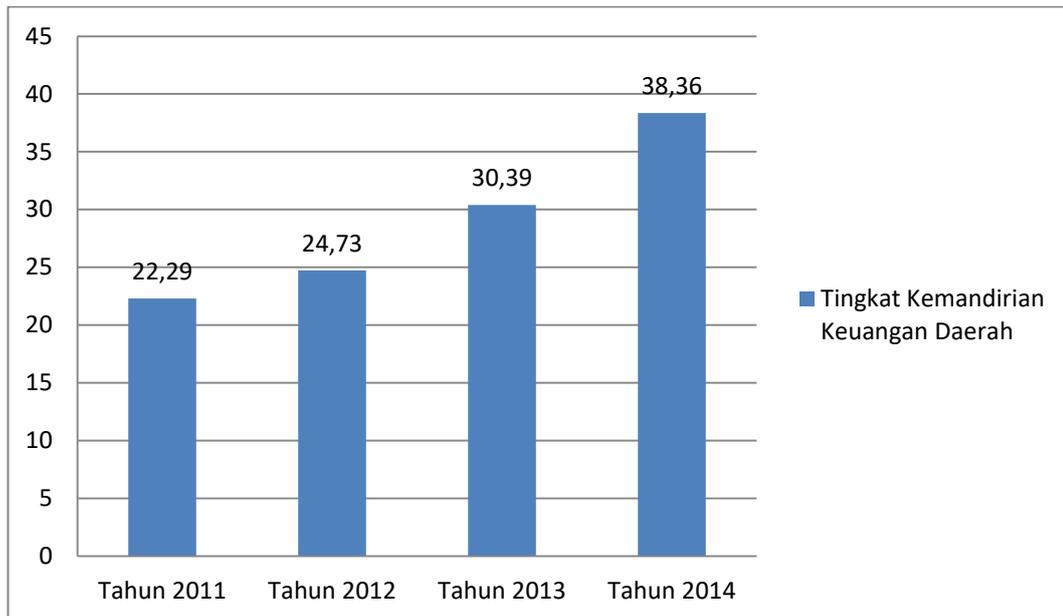
Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama (Fadly Nggilu dkk, 2016).

Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat merupakan daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerahnya, yang artinya Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi sumber pendapatan daerah yang nantinya dapat dijadikan modal untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerahnya. Jika Pemerintah Daerah mampu mengelola daerahnya dengan baik, diharapkan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dapat tinggi pula, itu menandakan bahwa daerah tersebut mampu secara mandiri membiayai kebutuhan daerahnya dan mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi Pemerintah Pusat dalam mendanai pembangunan daerah. Berikut merupakan kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 1.1 Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota

Persentase Tingkat Kemandirian	Kategori
0 – 25	Rendah Sekali
> 25 – 50	Rendah
> 50 – 75	Sedang
> 75	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Tahun 2011-2014 (data diolah)

Gambar 1.1 Rata-rata Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014

Berdasarkan Gambar 1.1, rata-rata persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan secara terus menerus. Namun rata-rata rasio kemandirian daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 28,94% yang artinya masih dibawah 50%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori rendah, dengan kata lain Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih bergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Artinya, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih belum mampu untuk mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Selama 4 tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan 2014, 17 daerah di Provinsi Jawa

Barat memiliki rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dibawah 25% yang artinya daerah tersebut termasuk ke dalam kategori rendah sekali, daerah tersebut antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran (Departemen Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan: Data Diolah Penulis).

Tabel 1.2 Kontribusi Masing-masing Pos dalam Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014

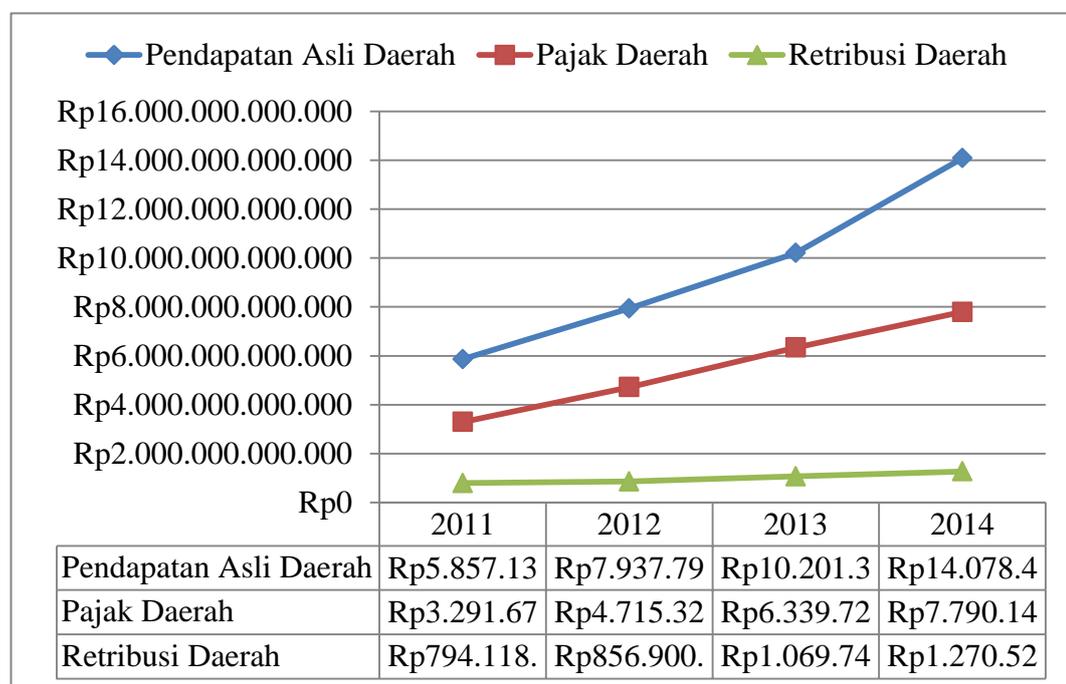
Tahun	Pendapatan Daerah		
	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2011	Rp 5.857.130.943.569	Rp 24.997.650.426.982	Rp 10.709.961.975.862
2012	Rp 7.937.799.679.015	Rp 30.469.991.715.477	Rp 9.757.731.835.517
2013	Rp 10.201.311.992.860	Rp 32.561.516.256.014	Rp 13.074.750.293.321
2014	Rp 14.078.741.106.989	Rp 35.165.193.332.814	Rp 16.348.543.031.740

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Tahun 2011-2014(data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Daerah dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, itu menunjukkan Pemerintah Daerah masih sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Dapat dilihat juga untuk Pendapatan Asli Daerah lebih rendah dibandingkan dengan Dana Perimbangan, itu menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan

Pemerintah Daerah dalam mengelola sendiri daerahnya. Maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih belum mampu untuk mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah, karena masih bergantung terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan secara terus menerus, terjadinya peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Berikut merupakan perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Tahun 2011-2014 (data diolah)

Gambar 1.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014

Berdasarkan Gambar 1.2, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan secara terus menerus. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diikuti dengan kenaikan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan Provinsi Jawa Barat mampu untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya sendiri, agar dapat menciptakan kemandirian yang baik.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis berpendapat bahwa dalam upaya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerahnya masing-masing, terutama dalam mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan unsur utama Pendapatan Asli Daerah, sehingga penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat diolah menjadi kawasan wisata, yang dapat menarik wisatawan dari luar dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerahnya, serta berdampak pada peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah.

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian, berikut diantaranya:

1. Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawita (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Belanja

Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Beta Asteria (2015) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Belanja Modal dan Belanja Pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
6. Hani Sri Mulyani dan H. Dadang Sudirno (2020) dengan judul penelitian “Pajak Daerah Pengaruhnya terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah Kab/Kota Ciayumajakuning”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah.
7. Krest D. Tolosang (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
8. Septyas Virgi Ardhani (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *Tax Effort* (Upaya Pajak) dan Dana Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Upaya Pajak,

serta Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

9. Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
10. Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen dan Debby Ch. Rotinsulu (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandiria Keuangan, serta Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.
11. Rizka Lutfita Novalistia (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Memperoleh

hasil penelitian bahwa Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

12. Nila Trisnaningrum dan Achmad Maqsudi (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014”. Memperoleh hasil penelitian bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
13. Irma Suryani (2019) dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 masuk dalam kategori “rendah” dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pun meningkat.
14. Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

15. Ari Mulianta Ginting, Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kabupaten/kota di Kluster I,III dan IV terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara untuk kabupaten/kota di Kluster II, Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
16. Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Rasio Efektivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

17. Muhammad Kadafi, Oemar Dhanny dan Dewi Wahyuni (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Belanja Modal secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, serta Belanja Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
18. Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Kinerja Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
19. Balqis, Sri Murdiati dan Amirah (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2013-2017”. Memperoleh hasil penelitian bahwa penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, penerapan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

20. Afifah Fauziah Amalia N. dan Haryanto (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017”. Memperoleh hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penulis, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawita (2016), Kabupaten/	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan	• Variabel independen, yaitu Belanja Modal dan Dana	• Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat	<i>Syariah Paper Accounting FEB UMS, ISSN: 2460-0784</i>

	Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014		Alokasi Khusus	Kemandirian Keuangan Daerah	
			• Tempat dan periode penelitian	• Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	
2	Beta Asteria (2015), Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 51-61
			• Tempat dan periode penelitian		
3	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011), Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan menggunakan variabel dependen lain (Y2), yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah	• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah	Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman 88-99, Januari 2011
			• Tempat dan periode penelitian	• Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah	
				• Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	

4	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 30-39, ISSN: 1907-9958 (<i>print</i>)
5	Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2015), Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2013	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Belanja Modal dan Belanja Pegawai • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Akuntansi Vol. 3, No. 1 (2015)

6	Hani Sri Mulyani dan H. Dadang Sudirno (2020), Kabupaten/ Kota Ciayumajaking	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen, yaitu Kemandirian dan Pembangunan Daerah • Tempat dan periode penelitian 	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1, Hal. 81-91, Mei 2010, E-ISSN: 2621-2012 P-ISSN 2655-822X
7	Krest D. Tolosang (2018), Daerah Kota Tomohon	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No.03 Tahun 2018
8	Septyas Virgi Ardhani (2014), Jawa Timur	Variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum serta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian 	Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol 2, No 3 (2014)

			variabel dependen lainnya, yaitu Tax Effort (Upaya Pajak) dan Alokasi Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Upaya Pajak • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal 	
9	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh (2016), Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016
10	Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen dan Debby	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap 	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah

	Ch. Rotinsulu (2018), Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu		dan Pendapatan Asli Daerah	• Tempat dan periode penelitian	Kemandirian Keuangan, tetapi pengaruhnya tidak signifikan	Vol.19 No. 7. 2018
					• Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan	
					• Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapata Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan	
11	Rizka Lutfita Novalistia (2016), Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen lainnya, yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak	• Tempat dan periode penelitian	• Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Journal of Accounting</i> , Volume 2 No.2 Maret 2016
					• Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	
					• Lain-lain	

					<p>Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
12	<p>Nila Trisnaningrum dan Achmad Maqsudi (2017), Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014</p>	<p>Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah • Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah 	<p>Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal 401-416 Volume 2, No. 1, Maret 2017</p>
13	<p>Irma Suryani (2019), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018</p>	<p>Tingkat Kemandirian Keuangan sebagai variabel penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 masuk dalam kategori 	<p>Jurnal Riset Akuntansi/ Vol 11/No.2/Oktober 2019</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • “Rendah” • Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	
14	Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah, serta variabel dependen lain, yaitu Belanja Modal • Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal • Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal mempunyai 	Jurnal <i>Progress Ekonomi Pembangunan</i> Volume 1, Nomor 2, 2016, Hal. 44-55 e- ISSN: 2502-5171

				pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	
15	Ari Mulianta Ginting, Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda (2019), Kabupaten/ Kota di Indonesia	Variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel independen, yaitu Dana Perimbangan	Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kabupaten/kota di Kluster I,III dan IV terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara untuk kabupaten/kota di Kluster II, Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Indonesian Treasury Review</i> Vol. 4, No. 2, (2019), Hal. 105-127
16	Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016), Provinsi DIY	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel independen, yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Jurnal Kajian Bisnis Vol. 24, No. 1, Hal. 25-34, Januari 2016

				<p>mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	
17	Muhammad Kadafi, Oemar Dhanny dan Dewi Wahyuni (2019), seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Belanja Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Penyertaan Modal Pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal dan Penyertaan 	Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda Volume 15 No. 1 April 2019 ISSN 2722-9327 (<i>online</i>)

					Modal Pemerintah secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	
18	Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel independen, yaitu Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 7, Nomor 6, Juni 2018 e-ISSN: 2460-0585	
19	Balqis, Sri Murdiati dan Amirah (2018), Dinas	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi	• Variabel independen lainnya, yaitu Dana Bagi Hasil	• Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi	Permana Vol. IX No. 2 Pebruari 2018	

	Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2013-2017	Daerah, serta variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Penerapan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	
20	Afifah Fauziah Amalia N. dan Haryanto (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen , yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal • Tempat dan periode 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum memiliki 	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN (online): 2337-3906

2017	penelitian	<p>pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
------	------------	--

Ritania Nurputri Utami (2020)

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.

3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat meningkatkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dijadikan sebagai pembandingan bagi peneliti lain dalam penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2019, dengan mengambil, mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan selama 8 bulan terhitung dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Juni 2021.